BAB IV

PENYAJIAN DATA & ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Paringin. Motto daerah ini adalah "Sanggam" yang diambil dari bahasa banjar yang berasal dari singkatan kata Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat. Kuliner Khas dari Kabupaten Balangan adalah Sirup Batumandi.

Kabupaten Balangan berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, "Banua Anam" penyebutan umum untuk daerah hulu sungai dari Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.828,1225 kilometer persegi dengan garis koordinat 2°1'37''- 2°35'58'' Lintang Selatan dan 114°50'24''- 115°50'24'' Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Balangan bebatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara di sebelah Barat, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur di Sebelah Timur, Hulu Sungai Tengah di sebelah Selatan dan Kabupaten Tabalong di sebelah Utara. Secara topografis Kabupaten Balangan sebagian besar merupakan Wilayah dataran/pegunungan. Luas areal perairan terdiri dari rawa 3.026 ha dan sungai 5.537 ha. Temperatur udara di daerah ini rata-rata 26 °C. Berdasarkan pengamatan Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru pada

tahun 2021, curah hujan di Kabupaten Balangan berkisar antara 31 mm sampai dengan 771 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (771 mm) pada pengamatan Stasiun Halong/Binjai Punggal dan curah hujan terendah terjadi pada Agustus (31 mm) di Stasiun Batu Mandi/Hamparaya. Sedangkan berdasarkan pengamatan jumlah hari hujan di Kabupaten Balangan berkisar 11 sampai dengan 20 hari per bulan.

Wilayah Kabupaten Balangan terdiri dari 8 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 154 Desa. Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Balangan adalah Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, Kecamatan Halong, Kecamatan Awayan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Kecamatan Halong merupakan kecamatan terluas yang mencakup 35,13 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Balangan sedangkan Kecamatan Paringin Selatan memiliki luas wilayah terkecil sebesar 86,80 kilometer persegi atau hanya 4,62 persen dari wilayah Kabupaten Balangan. Kecamatan Juai bersebelahan dengan Kecamatan Paringin yang mana merupakan Kecamatan yang paling dekat dengan Ibu Kota, Kecamatan Juai memiliki 21 Desa. Desa tersebut adalah Desa Muara ninian, Desa Hukai, Desa Hamarung, Desa Gulinggang, Desa Sungai Batung, Desa Tawahan, Desa Pamurus, Desa Marias, Desa Buntu Karau, Desa Sirap, Desa Mungkur Uyam, Desa Teluk Bayur, Desa Juai, Desa Gelumbang, Desa Tigarun, Desa Sumber Rejeki, Desa Bata, Desa Lalayau, Desa Mihu, Desa Wonorejo Dan Panimbaan.

Desa Muara Ninian merupakan salah satu dari 21 (duapuluh satu) desa di Kecamatan Juai. Desa ini berjarak 10 kilometer dari Ibu Kotakabupaten dengan luas wilayah desa 561,02 Ha. Adapun batas Wilayah Desa Muara Ninian Kecamatan Juai sebagai berikut Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Lamida Atas Kecamatan Paringin, Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Marias Kecamatan Juai, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Hukai Kecamatan Juai dan Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Lamida bawah Kecamatan ParinginJumlah penduduk Desa Muara Ninian berdasarkandata Profil Desa Muara Ninian pada akhir tahun 2023berjumlah ± 933 jiwa terdiri dari 454 orang laki-laki dan 479 orang perempuandengan mata pencarian utama dan dominan penduduk berkebun dan bertani.

2. Organisasi Pemerintah Desa Muara Ninian

D. Visi Dan Misi Lokasi Penelitian

Visi-Misi Desa Muara Ninian diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Muara Ninian, sebagai berikut:

"Terwujudnya Desa Muara Ninian Yang Agamis, Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Muara Ninian merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Muara Ninian

Dalam meraih visi Desa Muara Ninian seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Muara Ninian diantaranya:

1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.
3) Menata Pemerintahan Desa Muara Ninian yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
4) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.

5) Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.

6) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

7) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi .

8) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan kewira usahaan.

E. Struktur Organisasi Pengurus Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Muara Ninian, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan terdiri dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bid. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Bid. Keuangan, Bid. Kesejahteraan dan pelayanan, Bid. Pemerintahan, Kepala Wilayah, Ketua RT. 01, RT. 02, RT. 03.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa



Sumber: Kantor Desa Muara Ninian

3. Sarana Prasarana Desa Muara Ninian

Sarana dan prasarana yaitu faktor penunjang terlaksananya pekerjaan. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap akan memudahkan dan membantu masyarakat untuk mendukung segala aktivitas. Adapun sararana prasarana yang dimiliki Desa Muara Ninian adalah:

Tabel 4.1
Sarana Prasarana Desa

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Mushola, Langar dan Mesjid	5
3	SD/MI	2
4	TK/PAUD	1

5	Ambulans	1
6	Mobil Angkut Sampah	1
7	Rumah Bidan	1
8	Perpustakaan Desa	1

Sumber: Tabel Diolah 2024

4. Hasil Data

Pelaksanaan BPNT di Kabupaten Balangan telah berjalan sejak tahun 2019. Di Kabupaten Balangan terdapat 8 (delapan) pendamping BPNT, Dimana setiap kecamatan memiliki 1 (satu) pendamping yang bertujuan untuk mendampingi dan memberikan penjelasan kepada KPM mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada enam (6) informan yang memenuhi kriteria sampling. Informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Pendamping Pelaksana BPNT, Kepala Desa, Agen E-warong dan masyarakat Desa Muara Ninian yang menerima BPNT.

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan data terkait pelaksanaan program BPNT dalam optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperoleh informasi penelitian dari beberapa informasi dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama	: H. Ribowo
Tempat Tanggal Lahir	: Paringin, 11 September 1996
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Pekerjaan/Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan
Alamat	: Paringin
Anggota Keluarga	: 4
Pendidikan Terakhir	: S1

Kepala Dinas Sosial ini mengawasi setiap program BPNT di Kabupaten Balangan, untuk program BPNT ini sangat diapresiasi oleh Bapak H. Ribowo karena program ini sangat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Balangan dan Bapak Ribowo telah melakukan sosialisasi kedelapan 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan terkhusus apabila ada peraturan baru dari kementrian sosial, dan ikut serta dalam rekonsiliasi antara pendamping BPNT dengan Bank Mandiri. Setiap ada kegiatan pelaksaan BPNT Bapak H. Ribowo memonitoring baik dari segi pembagian KKS oleh Bank Mandiri di setiap kecamatan sampai dengan monitoring penyaluran transaksi KPM di Agen e-warong, kepala dinas sosial mengharuskan setiap Agen e-warong untuk melampirkan harga bahan pokok sembako setiap bulannya sebagaimana harga bahan sembako yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Bapak Ribowo sangat senang dengan dikeluarkannya program bantuan pangn non tunai (BPNT) yang dapat membatu mensejahterakan masyarakat kurang mampu di tiap daerah. BPNT adalah bantuan yang diprogram Dinas Sosial berupa saldo sebesar Rp.200.000 yang ditukarkan dengan sembako

seperti beras, daging, sayur-sayuran, ikan, dan telur yang dapat diambil dari Agen e-warong yang bekerjasama dengan Bank Himbara.

Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyediaan barang adalah Badan Urusan Logistik (Bulog), Bulog bertanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi barang kebutuhan pokok yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penyediaan barang BPNT dilakukan dalam bentuk bahan pangan yang dipilih oleh pemerintah, seperti beras, yang bisa diambil KPM di Agen e-warong yang bekerjasama dengan bank penyelenggara (Bank Mandiri). Agen e-warong ditunjuk langsung oleh Dinas Sosial sebagai penyediaan sembako tiap desa yang akan diberikan kepada KPM. Jenis pangan yang disalurkan berupa beras, sayuran, ikan, daging dan telur yang dapat memenuhi gizi KPM dengan bahan berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Program BPNT sangat diterima oleh masyarakat terutama masyarakat Desa Muara Ninian, masyarakat sangat senang dengan adanya program bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Desa Muara Ninian, karena program bantuan pangan secara langsung memberikan konstribusi terhadap masyarakat berupa beras, sayuran, ikan, daging dan telur untuk dikonsumsi sehari hari, dengan adanya bantuan ini masyarakat kurang mampu dapat terbantu dari segi pegeluaran untuk keperluan makan.

Bapak Ribowo juga memantau setiap pencairan dana bantuan pangan non tunai (BPNT), Bapak Ribowo ikut terjun kelapangan untuk melihat bagaimana pelaksaan bantuan pangan non tunai di setiap daerah, Bapak Ribowo selalu menghimbau kepada pendamping untuk selalu melaporkan tiap kegiatan kepada Kepala Dinas. Bapak Ribowo juga meminta kepada pemilik e-warong agar memberikan bukti penyerahan bantuan pangan non tunai, baik secara dokumentasi maupun secara langsung, Agen e-warong juga diharuskan melapirkan harga tiap bahan pokok setiap bulan sebagiamana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar tidak ada kecurangan dalam penetapan harga bahan pangan dan pemilik e-warong juga diharuskan memberikan resi belanja agar adanya keterbukaan antara pemilik e-warong dan keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun aturan yang dijadikan pedoman penunjukan dan pembagian pangan oleh Dinas Sosial berdasarkan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai" (H. Ribowo, Komunikasi Pribadi, 2024).

Dari wawancara bersama kepala Dinas Sosial terlihat bahwa kepla Dinas Sosial sangat, Bapak H. Ribowo senang dengan adanya bantuan ini, kepala dinas sosial juga berpratisipasi secara aktif terjung kelapangan untuk mengecek penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). H. Ribowo

menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme BPNT ini dan untuk wewenang pendistribusian BPNT berdasarkan dengan peraturan pemerintah.

2. Informan Kedua

Nama : Jamilawati

Tempat Tanggal Lahir : 14 April 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/Jabatan : Pendamping BPNT

Alamat : Desa Hukai Rt.01 Kec. Juai, Kab. Balangan

Anggota Keluarga : 3

Pendidikan Terakhir : UIN Antasari Banjarmasin

Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan (PSBPK) atau yang akrab disebut pendamping adalah salah satu pelaksana didalam BPNT yang memiliki beberapa peran dan tanggung jawab, peneliti melakukan wawancara dengan ibu jamilawati selaku pendamping dari BPNT Kec Juai. Ada banyak peran pendamping dan sistem pelaksanaan yang dipaparkan oleh ibu Jamilawati yaitu antara lain mengawasi dan sosialisasi

> "Pendamping mengawasi jalannya distribusi, berkordinasi dengan Agen e-warong yang bekerjasama dengan bank mandiri untuk menginformasikan pencairan saldo pada KKS, dan menginstruksikan kepada Agen e-warong untuk memberitahu kepada KPM untuk segara melakukan pencairan dana sejumlah Rp. 200.000 yang ditukar dengan sembako berupa beras, sayuran, ikan, daging dan telur, selanjutnya pendamping memonitoring lancarnya penyaluran agar tidak terjadi pemaketan barang, pendamping juga memastikan bagaimana ketepatan sasaran bantuan pangan non tunai (BPNT) dan mempu mengurangi kemiskinan. Sebagai pendamping juga sesekali memberikan sosialisasi terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) bagaimana cara kerja

dari program BPNT kepada penerima manfaat maupun calon penerima manfaat.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran saya selalu meminta data berapa jumlah KPM yang mencairkan di e-warong setaip bulannya, jika pada bulan pertama dan kedua mengalami perubahan maka akan tahu siapa yang tidak mencairkan, pendamping mengecek apakah KPM tersebut sudah tidak terdaftar atau sudah wafat yang nantinya setelah dicek bantuan dapat dialihkan jika memang masih layak mendapatkan, untuk pengecekan data saya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG), jika sudah tidak menerima akan saya konfirmasi ke KPM, apabila KPM Wafat maka bantuan akan dicabut dan merubah data di aplikasi SIKS NG tadi, namun jika KPM memiliki ahli waris yang sesuai dengan persyaratan, bantuan tersebut akan dialihkan". (Jamilawati, Komunikasi Pribadi, 2024).

untuk sekarang bantuan ini tepat sasaran karena pendamping melakukan verifikasi dan validasi yang mana setiap tiga bulan sekali pengupdatean data dan tiap tahun akan ada perubahan data penerimana, yang mana dari pengupdatean data berfungsi untuk memfilter masyarakat yang memang kurang mampu dan berhak menerima bantuan pangan non tunai ini (BPNT) ini. Hal ini mampu mengurangi kemiskinan di Desa Muara Ninian, karena penerima bantuan pangan non tunai ini (BPNT) dapat menambah penghasilan, atau dapat dijadikan modal usaha seperti membuka warung makan dengan sembako yang diberikan tersebut.

"Apabila semua KPM melakukan transaksi pendamping melakukan rekonsiliasi (mengatahui berapa jumlah yang sudah bertransaksi dan yang belum bertransaksi) dengan bank mandiri. Pendamping memastikan KPM yang belum melakukan pencairan dana memiliki alasan seperti sakit, pindah kependudukan dan meninggal, apabila KPM berhalangan dalam pencairan saldo maka pencairan dapat diwakilkan oleh ahli waris dan meminta ahli waris agar segera melakukan transaksi agar saldo tersebut dapat dicairkan dan apabila sampai 3 bulan berturut-turut tidak bertransaksi maka saldo akan dikembalikan ke kas Negara" (Jamilawati, Komunikasi Pribadi, 2024).

Peneliti juga mewawancara mengenai kendala apa yang pendamping BPNT rasakan selama penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) ini

"Untuk kendala penyaluran ini adanya pemaketan dari Agen e-warong, yang mana Agen e-warong tersebut hanya menyediakan sembako berupa berasa dan telor saja, seharusnya Agen e-warong juga menyediakan daging, ikan dan sayuran untuk ditukarkan KPM, serta tidak adanya resi pembelian yang diberikan Agen e-warong kepada KPM sehingga terjadinya ketidakterbukaan antara dua belah pihak, mengenai hal tersebut tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial terhadap oknum yang menyalahgunakan penyaluran bantuan hanya sekedar teguran saja yang diberikan" (Jamilawati, Komunikasi Pribadi, 2024).

Peneliti juga bertanya mengenai kesulitan dan langkah apa saja yang diambil sebagai solusi dalam kesulitan tersebut

"Kesulitan itu biasanya terletak pada jaringan, karena biasanya ada desa yang jaringannya tidak mendukung untuk melakukan transaksi, biasanya transaksi dilakukan melalui media EDC, informasi mengenai penyaluran lambat didengar masyarakat dikarenakan lambatnya jaringan tersebut, selanjutnya pengambilan dana bantuan pada Agen e-warong dengan jarak yang cukup jauh serta akses jalan yang kurang memungkinkan, karena ada sebagian desa yang akses jalannya masih berupa tanah kalau hujan ataupun banjir akses jalannya sulit untuk dilewati yang menjadikan keterlambatan dalam pengambilan.

Solusi dari masalah ini KPM dihimbau oleh pendamping untuk melakukan transaksi ke Agen yang mempunyai jaringan internet yang lebih bagus untuk melakukan transaksi pengambilan dana, untuk akses jalan yang yang tidak bisa dilalui ataupun pengambilan yang jauh ada toleransi dari kementrian sosial yang diberikan kepada KPM untuk melakukan transaksi tiga bulan sekali untuk meminimalisir pengeluran berpergian karena biasanya banyak KPM yang tidak mempunyai kendaraan untuk pergi mengambil dana bantuan" (Jamilawati, Komunikasi Pribadi, 2024).

Peneliti mendapatkan pemahan bahwa setiap aspek pelaksanaan BPNT harus melibatkan pendamping BPNT, mulai dari pemberitahuan KPM, Kendala Pencairan dana dan hal-hal yang menyangkut BPNT lainnya.

3. Informan Ketiga

Nama : Taufik Rahman

Tempat Tanggal Lahir : Bangkal, 02 Juli 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Muara Ninian

Alamat : Muara Ninian RT. 002, Kec. Juai, Kab. Balangan

Anggota Keluarga : 4

Pendidikan Terakhir : SMA

Kepala desa menjadi salah satu informan penelitian ini yang mana kepala desa ikut membantu jalannya penyaluran sebelum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), setiap adanya pelaksaan bantuan dari Dinas, Dinas mengkonfirmasi kepada desa bahwa adanya bantuan yang disalurkan oleh dinas tersebut. Sebelum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Muara Ninian diberikan langsung kepada masyarakat, Agen E-warong memberitahukan kepada kepala Desa bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dicairkan, selanjutnya kepala desa memberitahakun kepada penerima bahwaBantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dicairkan dan dapat diambil di Agen E-warong .

"Kepala Desa mengetahui bahwa di Desa Muara Ninian terdapat bantuan berupa pangan yang disalurkan oleh Dinas Sosial. Penerima bantuan pangan di Desa Muara Ninian tercatat sebanyak tujuh (7) orang. Kepala Desa sangat senang dengan adanya program BPNT karena dapat membantu kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Ninian, terlebih untuk masyarakat yang kurang mampu mereka merasa terbantu dengan adanya program BPNT, setiap adanya pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT) Kepala Desa diberitahukan Agen e-warong bahwa dan telah dicairkan dan

bisa diambil, setelah saya diberituhukan bahwa bantuan tersebut dapat diambil saya memberitahukan masyarakat untuk pengambilan dana tersebut" (Taufik Rahman, Komunikasi Pribadi, 2024).

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai pelaksaan BPNT apakah kepala desa memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran penerimanya.

"Kepala Desa memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat di Desa Muara Ninian, dapat dilihat bahwa penerima BPNT di Desa ini merupakan mereka yang memang membutuhkan bantuan, mereka yang mendapatkan bantuan ini ialah mereka yang tidak cukup untuk memenuhi kebutannya dengan adanya bantuan ini mereka merasa tercukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai kepala desa, Bapak Taufik menyarankan kepada Agen e-warong agar tertib pada penyaluran BPNT dan transparan mengenai harga serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk dapat memilih kebutuhan pangan sesuai dengan minat KPM, selanjutnya saran saya terhadap masyarakat untuk menyimpan KKS, KTP dan KK sebaik mungkin agar tidak ada laporan kehilangan, kartu sebaiknya disimpan sendiri jangan disimpan Agen e-warong atau pihak selain ahli waris" (Taufik Rahman, Komunikasi Pribadi, 2024).

Kepala Desa Muara ninian merasa senang dengan adanya bantuan ini, karena masyarakat dapat terbantu, dan masyarakat yang mendapatkan bantuan ini merupakan meraka yang memang kurang mampu dan pantas untuk diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini.

4. Informan Keempat

Nama	: Ahmad
Tempat Tanggal Lahir	: Amuntai, 10 Oktober 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan	: Agen e-warong
Alamat	: Desa Marias, Kec. Juai, Kab. Balangan
Anggota Keluarga	: 3
Pendidikan Terakhir	: SMA

Evaluasi kebijakan program perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan. Dalam wawancara bersama Agen e-warong yakni Bapak Ahmad mengungkapkan adanya sosialisasi program bantuan pangan non tunai, hal ini di ketahui dari Bapak Ahmad selaku Agen e-warong bantuan sosial dalam wawancara mengatakan

> "BPNT merupakan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang ditukarkan dengan sembako seperti Beras 10kg, telur 1 rak (30 butir) itu diberikan kepada KPM tiap bulannya, langsung dari Dinas Sosial yang disalurkan melalui saya selaku Agen e-warong yang bekerja sama dengan Bank penyalur (Bank Mandiri)" (Bapak Ahmad, Komunikasi Pribadi, 2024).

Agen e-warong sebagai salah satu pelaksana program BPNT berperan sebagai penyalur bagi para KPM yang ingin mencairkan dana bantuan dan ditukarkan dengan sembako yang sudah ditentukan yang mengandung protein dan karbohidrat

Peneliti melakukan wawancara dengan Agen e-warong yaitu Bapak Ahmad yang bertempat di Desa Marias

> "Bapak Ahmad mengatakan bahwa e-warong merupakan tempat pencairan dana bantuan yang diberikan oleh Kementrian Sosial melalui Bank Mandiri. Setiap KPM yang mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu tersebut akan terisi dana sebeser Rp. 200.000 yang nantinya dana ini dapat dicairkan melalui Agen e-warong yang memiliki mesin EDC dan bekerja sama dengan Bank Mandiri, pencairan dana bantuan yang dilakukan di Agen e-warong mempunyai beberapa tahapan dari mulai pengecekan dana sampai dengan penukaran dana menjadi sembako (Bapak Ahmad, Komunikasi Pribadi, 2024).

Peneliti melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan terkait bagaimana proses pencairan BPNT kepada Bapak Ahmad selaku Agen e-warong

> “Pertama, pendamping akan mengkonfirmasi kepada Agen e-warong menginformasikan bahwa dana BPNT akan cair, informasi ini akan diberitahukan H-1 sebelum pencairan ke Agen e-warong, selanjutnya Agen e-warong membeli keperluan sembako untuk kebutuhan KPM sebelum sebelum pencairan dana bantuan. Untuk bahan sembako sendiri Agen e-warong membeli bahan sembako di toko sembako yang besar yang ada dipasar dekat tempat Agen e-warong yang menyediakan beras dan telur (Bapak Ahmad, Komunikasi Pribadi, 2024)

Hal ini berguna untuk meningkatkan ekonomi, juga bahan-bahan yang dibeli tertunya yang berkualitas, dari beras dan telur.

> Selanjutnya Pak Ahmad menyampaikan “Setelah semua sembako yang diperlukan dibeli, maka Agen E-warong menginfirmasikan kepada KPM terdekat untuk pengecekan saldo KKS pada hari pencairan dana. Setelah pengecekan saldo dan saldo KKS sudah terisi Agen e-warong mulai menginfokan kepada KPM yang lebih banyak untuk mencairkan dana di Agen e-warong” (Bapak Ahmad, Komunikasi Pribadi, 2024).

Secara umum Agen e-warong yakni Bapak ahmad membantu mensosisalisasikan mengenai hal hal penting untuk mendukung kelancaran program bantuan pangan non tunai (BPNT) beliau juga menjelaskan bahwa untuk pencairan bantuan itu dilakukan pada saat tanggal sekian ketika saldo sudah masuk di rekening KPM, penyampaian ini mulai dari Bank Penyalur kepada Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial menyampaikan kepada TKSK, Selanjutnya kepada Agen. Pelaksanaan pencairan dilakukan dengan KPM datang ke Agen e-warong membawa KKS.

Sebagai pemilik e-warong Bapak Ahmad memungut biaya penarikan untuk pencairan dana sebesar Rp. 5.000. Bapak Ahmad mengharuskan bahwa penarikan dana langsung dilakukan oleh KPM maupun keluarga yang dipilih KPM untuk pencairan dana (ahli waris), kebanyakan KPM tidak tahu cara menggunakan mesin EDC, karena usia

yang lanjut, maka Pak Ahmad membantu KPM dalam bertransaksi dari mulai memasukkan KKS pada mesin EDC sampai transaksi berhasil atas persetujuan KPM. Pak Ahmad menambahkan

"Setelah data dan nominal sesuai maka selanjutnya saldo KKS akan diambil melalui mesin EDC sebesar Rp. 200.000 yang selanjutnya akan ditukarkan dengan sembako berupa beras dan telur" (Bapak Ahmad, Komunikasi Pribadi, 2024).

Tabel 4.2
Jenis Pangan

No	Jenis Pangan	Jumlah
1	Beras	1 karung (11 litar)
2	Telur	1 rak (30 butir)

Sumber: Tabel Diolah 2024

KPM dapat menukarkan sembako tersebut menggunakan saldo KKS sebesar Rp. 200.000.

"Untuk resi pembelian biasanya Agen e-warong hanya menyebutkan nominal saja, karena di tempat Agen e-warong tidak menggunakan resi pembelanjaan seperti pada toko-toko besar yang ada di kota-kota" (Bapak Ahmad, Komunikasi Pribadi, 2024).

Peneliti juga mewawancara terkait kendala selama pelaksanaan pencairan BPNT yang berlangsung di Agen e-warong.

"Selama pencairan kendala-kendala yang dialami biasanya saldo di KKS masih kosong, KKS tidak terbaca dan saldo tidak diambil langsung oleh KPM, kartu rusak, patah, eror dan kartu hilang, sehingga harus dilakukan konfirmasi pencairan yang mengakibatkan pencairan itu terhambat, juga adanya ketidak-konsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya yang membuat KPM merasa cemas karena bantuan yang tidak sesuai dengan tanggal biasanya dicairkan" (Bapak Ahmad, Komunikasi Pribadi, 2024).

Data temuan penelitian selanjutnya berdasarkan observasi yang dilakukan, observasi yang dilakukan peneliti melalui pengamatan dengan

mengamati cara pemilik Agen e-warong dalam melayani KPM, mulai dari KPM datang sampai dengan penukaran uang bantuan menjadi sembako. Agen e-warong memperhatikan kebutuhan KPM, memerhatikankebutuhan KPM, memperlihatkan nominal bantuan yang didapat pada mesin EDC, merincikan bahan pangan yang bisa dibeli dengan nominal tersebut sesuai dengan pedoman BPNT. Kekurangan dari Agen e-warong sendiri dari hasil observasi yaitu kurangnya pengetahuan mengenai BPNT yang menjadikan penyaluran dana ini tidak sesuai dengan pedoman BPNT.

5. Informan Kelima

Nama : Norhanah

Tempat Tanggal Lahir : Muara Ninian, 14 Februari 1960

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/Jabatan : Penerima BPNT

Alamat : Muara Ninian, RT. 002, Kec. Juai, Kab. Balangan

Anggota Keluarga : 1

Pendidikan Terakhir : SD

Peneliti memfokuskan kepada manfaat yang diterima KPM, ketepatan sasaran, dan kesejahteraan sosial ekonomi yang terjadi pada KPM, selama pelaksaan BPNT banyak manfaat yang dapat dirasakan penerima manfaat, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada KPM yaitu Ibu Norhanah yang merupakan penerima BPNT di Desa Muara

Ninian. Ibu Norhanah telah mendapatkan BPNT dan menjadi KPM dari tahun 2021.

Peneliti melakukan wawancara mengenai manfaat dan permasalahan yang terjadi, dari hasil wawancara sebelumnya dengan Pak Ahmad, mengatakan bahwa ada beberapa KKS KPM yang dipegang oleh masing-masing Kepala Desa ataupun Agen e-warong sendiri, hal itu juga merupakan masalah yang terjadi selama pelaksanaan BPNT berlangsung yang menyebabkan adanya pemotongan bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pengambilan data dari wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai selama pelaksanaan program BPNT yang memuat manfaat, kecukupan pangan dan minat KPM dalam memilih sembako, kualitas bahan makanan,alur pencairan, kendala dan sebagainya. Ibu Norhanah mengatakan

"Ibu Norhanah bersyukur dengan adanya bantuan pangan non tunai (BPNT) ini. Selama ada bantuan ini Ibu Norhanah sangat terbantu bisa dapat bantuan dari pemerintah mulai dari beras untuk makan maupun telur untuk lauk sehari-hari dengan kualitas yang bagus, BPNT ini sangat memberikan manfaat kepada KPM, alhamdulillah pengeluaran KPM jadi berkurang, jauh lebih ringan apalagi KPM merupakan lansia yang sudah tidak memungkinkan untuk berkerja dan tinggal seorang diri, hanya mengharap pemberian anak saja, KPM merasa tercukupi dan terpenuhinya kebutuhan selama satu bulan dengan adanya bantuan pangan non tunai (BPNT) ini" (Ibu Norhanah, Komunikasi Pribadi, 2024).

Dari wawancara diatas manfaat yang diterima KPM tentu sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan-makanan yang berkualitas, serta meningkatkan ekonomi secara tidak langsung bantuan pangan non tunai (BPNT) mensejahterakan masyarakat kurang

mampu, Selanjutnya Ibu Norhanah juga menjelaskan mengenai awal mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS) sampai dengan pencairan

"Ibu Norhanah didatangi oleh pendamping BPNT dari Kecamatan Juai, diberitahu bahwa mendapatkan bantuan sosial berupa kartu yang nanti dikirim saldo terus bisa ditukar di warung dengan sembako seperti beras, telor, ikan dan sayuran, dijelaskan oleh pendamping BPNT bahwa dana yang didapat berupa saldo sejumlah Rp. 200.00 yang ditukarkan dengan sembako, bagaimana cara ngambilnya, yaitu sengan membawa kartu keluarga sejahtera (KKS), yang diberikan dinas sosial, terus dimana mencairkan dananya dan bisa dapat apa saja dari dana tersebut, setiap mau ada pencairan pasti saya diinfokan sama Agen e-warong dan dicek kartu KPM sudah ada isinya atau belum" (Ibu Norhanah, Komunikasi Pribadi, 2024).

Selama pencairan berlangsung peneliti mengamati bagaimana KPM bisa mememenuhi kebutuhannya sesuai dengan pedoman BPNT dan semua kualitas bahan makanannya diberikan yang terbaik oleh e warong, Agen e-warong pun mengayomi dan memberikan arahan ketika KPM ingin mencairkan dana.

Peneliti juga mewawancara keluarga penerima manfaat (KPM) mengenai keluhan yang dirasakan oleh penerima manfaat selama pencairan yang dilakukan pada Agen e-warong..

"Adapun keluhan KPM biasanya masalah dikartu sama infonya cair dananya suka telat, ketika mau cairkan dananya biasanya dikasih tau dulu oleh Agen e-warong buat datang bawa kartu, kadang kartunya suka tidak terbaca harus nunggu walaupun tidak lama, yang gesek kartunya Agen e-warong karena takut salah, biasanya kalau dana belum masuk saya menunggu besok untuk pencairannya, atau bisa lebih lama kadang sampe sebulan, untuk pemilihan semboko saya tidak bisa memilih karena sembako yang diberikan berupa beras dan telor saja, Agen e-warong juga tidak memberikan resi pembelian dari beras dan telur yang telah ditukarkan" (Ibu Norhanah, Komunikasi Pribadi, 2024).

Dari penjelasan diatas, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa KPM merasakan manfaat secara langsung dari bantuan yang diterima guna

meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi, juga merasa terbantu dalam pencairan sampai dengan mengatasi kendala yang terjadi baik sebelum pencairan maupun sesudah pencairan.

6. Informan Keenam

Nama : Napsiah

Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 12 Oktober 1957

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/Jabatan : Penerima BPNT

Alamat : Muara Ninian, RT. 002, Kec. Juai, Kab. Balangan

Anggota Keluarga : 1

Pendidikan Terakhir : SD

Seperti halnya Ibu Norhanah, peneliti juga meneliti Ibu Napsiah selaku penerima BPNT di Desa Muara Ninian, peneliti juga mewawancara mengenai manfaat dan permasalahan yang terjadi.

"Ibu Napsiah didatangi oleh pendamping BPNT, katanya terdaftar sebagai penerima bantuan, saya diberikan karu yang setiap bulan akan masuk saldo sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) (dua ratus ribu). Saldo itu ditukarkan dengan sembako di Agen e-warong. Ibu Napsiah merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan non tunai (BPNT) ini karena Ibu Napsiah ialah seorang lansia yang bekerja sebagai petani karet, yang mana penghasilannya tidak mencukupi keperluan rumah tangga Ibu Napsiah, karena faktor usia yang cukup berumur Ibu Napsiah tidak dapat bekerja secara berlebihan apalagi berkebun karet membutuhkan tenaga oleh sebab itu pendapatan Ibu Napsiah juga berkurang dengan adanya bantuan ini Ibu Napsiah merasa sangat terbantu, bantuan ini sangat bermanfaat bagi Ibu Napsiah, karena tidak perlu membeli beras karena sudah didapatkan dari bantuan pangan non tunai (BPNT) ini sehingga penghasilan saya yang seharusnya untuk membeli beras dapat saya bayarkan kepembayaran listrik maupun PDAM atau membeli kebutuhan lainnya.

Alhamdulillah bantuan ini cukup selama satu bulan karena Ibu Napsiah tinggal sendiri jadi untuk pangan yang diberikan ini sangat cukup" (Ibu Napsiah, Komunikasi Pribadi, 2024).

Peneliti juga mewawancara mengenai dan kesesuai pangan yang diberikan Agen e-warong dengan minat KPM, serta kendala yang dirasakan Ibu Napsiah selama pencairan yang dilakukan pada Agen e-warong.

"Untuk pangan ini sesuai saja dengan kebutuhan yang diperlukan, tetapi kalau boleh memilih sebagai KPM juga ingin mendapatkan sayur-sayuran atau ikan untuk makan tidak hanya telur saja sebagai lauk-pauknya, karena setiap bulan hanya diberiakan beras dan telur saja tidak ada variasi untuk lauk-pauknya, kendalanya mungkin tidak ada keterbukaan antara Agen e-warong karena tidak diberikannya resi pembelanjaan, keterlambatan pencairan pada KKS dan juga tidak diberikan resi dari sembako yang beli KPM" (Ibu Napsiah, Komunikasi Pribadi, 2024).

Dari wawancara dengan Ibu Napsiah kendala yang dirasakan sama seperti Ibu Norhanah yang mana kendala tersebut ada pada keterlambatan pencairan, tidak dapat memilih bahan makanan, serta tidak adanya keternukaan antara Agen e-warong dengan KPM, penyelesaian kendala ini dapat diselesaikan melalui evaluasi yang dilaukan oleh pendamping BPNT dengan Agen e-warong, untuk keberlanjutan program ini agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tidak akan adanya ditemukan masalah dikemudian hari.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan yang memenuhi kriteria, observasi awal dan lapangan ketika riset, dan dokumen-dokumen pendukung data penelitian. Peneliti menyajikan analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Ninian Kabupaten Balangan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut e-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Muara Ninian, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, maka peneliti menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari teori Dunn (2003) yang mencakup; efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Sebagaimana telah dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Efektifitas

Menurut William Dunn efektivitas merupakan berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran, berarti mungkin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektifivitas

ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil atau tujuan kebijakan (N.Dunn, 2000, hlm. 429).

Efektivitas program BPNT nantinya diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan administrasi, dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

Peneliti memfokuskan kepada pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT), maka dari itu evaluasi di Desa Muara Ninian peneliti hanya mencari data apa saja yang dievaluasi mengenai optimalisasi pelaksanaan program BPNT di Desa Muara Ninian, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan dengan tetap berdasar pada pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dapat dilihatsebagai berikut:

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam aspek perencanaan.

Aspek perencanaan merupakan tahap awal kegiatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai melalui rapat terbatas tentang keuangan inklusif pada tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai yang menggunakan perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Perencanaan BPNT terdiri dari koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan), tujuan koordinasi itu untuk memastikan mekanisme pelaksnaan di lapangan dan diharapkan mencapai 6 aspek yaitu, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas Dan Tepat Administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat meliputi pihak Kementeriaan Sosial, Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai, Bappenas, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan sejumlah pihak lainnya. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting sebagai instrumen penyedian sarana dan prasarana serta dukungan data-data akurat subjek bantuan tersebut agar tujuan adanya bantuan pangan non tunai bisa tercapai.

Aspek perencanaan Bantuan Pangan Non Tunai sangat menentukan kelanjutan pelaksanaan bantuan BPNT secara berjenjang yang diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Hal tersebut disarankan dilakukan oleh pihak pelaksana program bantuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPM.

1) Strategi program

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Muara Ninian sudah berlangsung sejak awal tahun 2018, dimana Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin khusus di Kabupaten Balangan, yang diberikan oleh pemerintah.

Srategi adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menjalankan wewenang dan mencapai tujuan dari program BPNT. Usaha tersebut membutuhkan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Pemerintah kecamatan atau desa yang terkait dan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.

Bahwa salah satu strategi yang dilakukan petugas Pendamping BPNT adalah melakukan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat dan calon keluarga penerima manfaat. Starategi ini sangat penting dilakukan, agar mengetahui dan memahami mengenai tujuan program BPNT.

2) Berdasarkan Kategorisasi

Desa Muara Ninian, Kabupaten Balangan merupakan salah satu yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT diselenggarakan dari pemerintah dan diberika kepada masyarakat yang merupakan program terbaru dari pemerintah dan diberikan kepada masyarakat dari pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007.

Sebelum dikenal dengan nama program BPNT dahulu program ini sering dikenal masyarakat sebagai program Raskin (Beras Miskin). Namun berganti nama menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) dengan Konsep yang lebih modern, BPNT ini berupa saldo sebesar Rp. 200.000 yang ditukarkan dengan sembako.

3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Aspek Pelaksanaan

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) telah terealisasi dengan baik, Namun, sejauh ini pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) belum dapat diukur dikarenakan belum ada catatan penelitian menyatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian untuk mencapai efektifitas suatu program BPNT terkhususanya di Desa Muara Ninian harus memenuhi 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas Dan Tepat Administrasi.

a) Tepat Sasaran

Sasaran BPNT adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin.Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa bahwa peran pemerintah menjadi sentral pelaksanan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan perlunya kerjasama yang baik dengan para pendamping supaya pelaksanaan BPNT tersebut berjalan sesuai dengan prosedur, tepat sasaran dan sebagai langkah strategis memenuhi taraf kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Sejauh ini sasaran dari BPNT ini sudah tepat, karena setiap tiga bulan sekali dilakukan verifikasi dan validasi pengupdetan data yang membuat ketepatan sasaran pemberian bantuan pangan non

tunai (BPNT) di Desa Muara Ninian. Program BPNT juga tepat sasaran dalam membantu mereka meringankan beban hidup meskipun tidak memberikan dampak yang sangat besar akan tetapi bantuan yang diberikan telah membantu KPM memenuhi gizi dengan seimbang.

b) Tepat Waktu

Pembagian sembako berupa beras dan telur yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan ini tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan di awal sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan.

Ketidak konsistenan jadwal penyaluran ini karena adanya keterlambatan yang terjadi dikarenakan saldo dari pusat belum masuk kedalam rekening KPM, pihak petugas Dinas Sosial maupun Agen e-arong hanya bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyakan kepada pihak Bank Himbara seperti Kantor Bank Mandiri Wilayah, karena untuk permasalahan saldo yang bertanggung jawab adalah pihak Bank Himbara nya.

c) Tepat Jumlah

Pada tingkat pelaksanaan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Muara Ninian, Kabupaten Balangan, sejauh ini bantuan yang diterima oleh penerima manfaat (KPM) sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang mana setiap bulannya mendapatkan saldo sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun ditemukannya penyimpangan pada penukaran saldo menjadi sembako, karena tidak adanya resi pembelanjaan dari Agen E-warong yang menyebabkan ketidakterbukaan harga bahan pangan antara KPM dengan Agen E-warong mengenai nominal dari sembako yang diberikan.

Berdasarkan hasil tersebut dari segi ketepatan jumlah program BPNT dinilai belum tepat.

d) Tepat Kualitas

Sebelum bantuan sosial disalurkan, dilkukan pengecekan beras terlebih dahulu terkait kualitas kelayakan panga oleh pendamping BPNT. Setelah pengecekan sudah dilakukan dan dinyatakan sudah memenuhi standar medium yang akan disalurkan dalam kondisi layak konsumsi. Sejauh ini kualitas pangan yang disalurkan untuk KPM di Desa Muara Ninian sudah tepat, karena pangan yang diberikan merupakan pangan yang berkualitas.

e) Tepat Harga

Harga Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Muara Ninia seperti beras dan telur yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak pungut biaya. KPM hanya perlu membawa KKS ke Agen e-warong untuk mengambil beras dan telur yang disiapkan, tetapi untuk pengambilan saldo pada Agen e-warong memungut biaya penarikan (biaya admin) sebesar Rp. 5.000 (lima ribu).

f) Tepat Administrasi

Tepat Administrasi ialah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.Sistem yang digunakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yakni menggunakan sistem kartu kombo atau sering disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat yang sudah berhasil melalui tahap verifikasi data maupun validasi data dan dinyatakan menjadi KPM.

Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) para penerima manfaat bantuan tersebut akan mendapatkan saldo rekening sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) setiap bulannya. Saldo tersebut akan dicairkan kepada Agen E-warong untuk

menukarkan saldo tersebut dengan kebutuhan pokok pangan seperti beras dan telur.

Berdasarkan indikatot 6T diatas bahwasanya program BPNT di Desa Muara Ninian ini belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidaktepatan waktu dalam pembagian program BPNT yang seharusnya rutin sebulan sekali ini malah tidak menentu kapan keluarnya.Dan adanya ketidaktepatan jumlah pada pemebelian sembako karena tidak dilampirkan resi pembelanjaan sehingga tiadak ada keterbukaan nominal pembelian.

Meskipun demikian indikator ketepatan sasaran, kualitas,harga sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil lapangan dapat disimpulan bahwa untuk mencapai program Bantuan Pangan Non Tunai dengan hasil yang efektif di Desa Muara Ninian, harus memenuhi 6 indikator yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas Dan Tepat Administrasi sehingga program tersebut akan berjalan dengan efektif. Dari Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas program BPNT masih belum sesuai dengan teori William (N.Dunn, 2003, hlm. 499) mengenai pemenuhan kriteria efektivitas.

b. Efisiensi

Menurut William N Dunn, Efesiensi *(efficiency)* berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efesiensi

tertentu. Fokus dari kriteria ini adalah banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan program BPNT meliputi sumber daya yang digunakan baik alokasi tenaga (SDM), estimasi waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (N.Dunn, 2003, hlm. 430).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Untuk melihat tingkat kefisiensian dari BPNT di Desa Muara Ninian terdapat 2 (dua) sasaran kajian yang digunakan yakni ada dua hal yang menjadi sasaran kajian yaitu efisiensi sumber daya dan efisiensi waktu.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu program BPNT cukup banyak menggunakan SDM yang diperlukan dalam pemantauan dan penyaluran bantuan mulai dari Dinas Sosial, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Balangan, Pendamping Sosial dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa dan Agen penyalur BPNT. Penyaluran bantuan belum tepat waktu bahkan beberapa kali penyaluran bantuan terlambat dicairkan dalam satu waktu, tidak sesuai dengan waktu pencairan diawal. Akan tetapi waktu pengambilan bantuan tidak membutuhkan waktu yang lama karena Agen e-warong telah dilatih untuk memproses permintaan dengan cepat dan efisien.

Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa efisiensi program BPNT sudah sesuai dengan teori dari William N Dunn (N.Dunn, 2003, hlm. 499)

yaitu menghasilkan tingkat efektivitas tertentu denganterpenuhinya SDM dan sedikit waktu yang diperlukan dalam program ini meskipun untuk pencairannya terkadang tidak sesuai dengan jadwal pencairan diawal.

c. Kecukupan

Menurut William Dunn kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (N.Dunn, 2000, hlm 430).

Kecukupan program bantuan pangan non tunai (BPNT) mengacu pada tujuan diadakannya BPNT yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, apakah mampu memecahkan masalah kemiskinan. Dengan adanya BPNT, ada beberapa hal yang secara tidak langsung akan terbantu, seperti mengurangi pengeluran, tambahan modal usaha dan mencungkupi keperluan rumah tangga, serta mengurangi beban orang-orang yang tidak mampu. Kecukupan juga berkaitan dengan sejauh mana konsep awal dari BPNT memuaskan kebutuhan dan nilai.

Dari wawancara yang dilakukan bisa diketahui bahwa BPNT dapat mengentaskan kemiskinan, sejauh ini dengan adanya BPNT ini bisa membantu kebutuhan sehari-harinya KPM, dapat mengurangi pengeluaran KPM danterpenuhinya gizi dari bahan pangan yang berkualitas yang diberikan oleh Agen e-warong, bantuan ini juga dapat dijadikan tambahan modal usaha. KPM Sudah jauh lebih baik, karena

adanya bantuan pangan non tunai (BPNT) ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari KPM.

Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa keberadaan bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang signifikan terutama kepada masyarakat kurang mampu. Dan pencapaian terbesar seorang pendamping BPNT adalah apabila ada KPM yang mengalami graduasi(berakhirnya kepesertaan penerima bansos).

Pada indikator kecukupan, dapat dikatakan sesuai dengan teori yang dikatakan oleh William Dunn (N.Dunn, 2003, hlm. 499) karena penyelesaian masalah yang dialami oleh pendamping BPNT sudah maksimal.

d. Pemerataan

Menurut William Dunn perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (N.Dunn, 2003, hlm. 434). Pemerataan bantuan pangan non tunai (BPNT) berarti bahwa manfaat yang diterima oleh penerima BPNT didistribusikan secara merata, dengan kata lain pemerataan merupakan bagian dari keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal ini yaitu untuk menganalisis pendistribusian secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat BPNT. Untuk melihat tingkat perataan dari BPNT di Desa

Muara Ninian dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pemerataan pendistribusian BPNT dan berkurangnya masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu bantuan yang ada sudah dapat dikatakan merata ke masyarakat miskin, bahkan terdapat beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pengunduran diri. Hal ini dapat terjadi karena selalu dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai kelayakan penerima bantuan. Sehingga selalu ada update data mengenai penerima BPNT.

Program BPNT juga dapat dikatakan merata apabila dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin, program BPNT tidak bisa mengetahui apakah program ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin atau tidak. Karena penurunan jumlah penduduk miskin tidak hanya akibat dari pemberian BPNT saja melainkan juga ada bantuan lain yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu dari data yang ada pada Maret 2024 angka kemiskinan turun menjadi 9,03 persen dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 9,36 persen angka penduduk miskin di Indonesia.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perataan program BPNT sudah sesuai dengan teori William Dunn (N.Dunn, 2000, hlm. 434) yaitu pendistribusian sudah merata dan sudah diketahui bahwa telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin namun pengurangan

masyarakat miskin bukan hanya dari bantuan pangan non tunai (BPNT) saja.

e. Responsifitas

Menurut William Dunn (William Dunn 2000: 437) responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (N.Dunn, 2000, hlm. 437). Mengamati tingkat kepuasan masyarakat Desa Muara Ninian terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial, Kabupaten Balangan, serta melihat dukungan untuk program tersebut.Untuk melihat tingkat perataan dari BPNT di Desa Muara Ninian Respon ini biasanya berupa tanggapan positif atau negatif, dan bergantung pada seberapa jauh suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan. Baik pelaksana maupun masyarakat yang menerima bantuan pangan non tuunau (BPNT) di Desa Muara Ninian, memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap responsivitas terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan menjelaskan bahwa masyarakat merasa puas dengan bantuan yang ada. Pada dasarnya program BPNT mampu membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meringanankan beban keuangan keluarga.Masyarakat merasa cukup terbantu meskipun bantuan yang ada tidak dapat bertahan hingga penerimaan bantuan di bulan berikutnya.

Jika diamati secara menyeluruh dapat dilihat bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan teori William Dunn (N.Dunn, 2000, hlm. 437) masyarakat merasa puas meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Upaya-upaya yang dilakukan juga sudah ditekuni serta lebih ditingkatkan agar tercapainya target yang ada.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan *(Appropriateness)* adalah "Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas alternative, karena alternative ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau alternative untuk merealisasikan tujuan tersebut"

Artinya ketepatan dapat diisi oleh keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun dimungkinkan alternativ lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis (N.Dunn, 2003, hlm. 499).

Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yaitu apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. Untuk melihat tingkat perataan dari BPNT di Desa Muara Ninian dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan yakni hal yang dicapai bermanfaat dan bernilai serta membandingkan mekanisme di peraturan serta di realita.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan menjelaskan bahwa program BPNT sejauh ini yang terlihat sudah tepat dan sangat berperan penting mengentaskan kemiskinan, bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan pangannya hingga bulan selanjutnya. Selain itu juga program BPNT sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu saling berkoordinasi atau bekerjasama dengan lembaga terkait.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa program BPNT sudah sesuai dengan teori william dunn (N.Dunn, 2003, hlm. 499) yaitu hasil dari BPNT bermanfaat dan telah sesuai yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

BPNT memiliki beberapa faktor penentu sikap yang kurang berhasil dalam pelaksanaan program. Program BPNT dalam penyalurannya telah tepat sasaran akan tetapi belum tepat waktu karena pencairan tidak sesuai dengan tanggal pencairan awal, masyarakat juga

banyak yang tidak mengetahui mengenai ketentuan BPNT sehingga masyarakat memiliki pemikiran kalau pembagian bantuan tersebut tidak diambil pada saat waktu yang sudah ditentukan dapat diambil dibulan selanjutnya. Karena BPNT di Desa Muara Ninian dalam pelaksanaannya, sosialisasi belum dilakukan secara keseluruhan yang mana mengakibatkan banyak penerima bantuan yang kurang mengetahui mengenai BPNT, diharapkan program bantuan pangan non tunai (BPNT) kedepannya lebih baik lagi.

2. Kendala Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di desa Muara Ninian Kabupaten Balangan.

Setiap program selalu ada kendala pada saat pelaksanaanya, sebelum adanya sebuah hasil maka ada sebuah solusi yang dapat menahannya sehingga suatu kendala berubah menjadi suatu keadaan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi program pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Balangan dapat peneliti uraikan mengenai kendala pelaksanaan BPNT sebagai berikut

a. Pendamping BPNT

1) Adanya kendala pemaketan bahan pangan pada Agen e-warong

Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan ditemukan penyimpangan dalam mekanisme penyaluran bantuan program BPNT di Desa Muara Ninian Kabupaten Balangan. Dalam pedoman umum (pedum) terbaru tahun 2020 dijelaskan bahwa tidak boleh

melakukan pemaketan bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang sudah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain.

Hal ini membuat KPM tidak memiliki pilihan, atau dalam artian seharusnya KPM dapat membelanjakan jumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dan KPM bebas memilih jenis bahan pangan yang mereka inginkan sesuai dengan jenis pangan yang disebutkan dalam Pedoman Umum.

Jenis pangan tersebut antara lain beras, telur, daging, sayur-sayuran, ikan dan sebagainya, tetapi di Desa Muara Ninian Kabupaten Balangan Agen e-warong menerapkan sistem paket sehingga KPM hanya bisa menukarkan jumlah bantuan sesuai paket yang telah disediakan yaitu telur dan beras.

Hal tersebut menurut pendamping BPNT terjadi karena ketidaksiapan Agen e-warong selaku penyedia pangan yang seharusnya bertanggung jawab melakukan penyedian pangan bantuan secara optimal di wilayahnya yakni di Desa Muara Ninian Kabupaten Balangan. Agen e-warong masih menggunakan sistem paket dikarenakan jumlah KPM di Desa Muara Ninian Kabupaten Balangan ini cukup banyak, Agen e-warong bukan hanya menyediakan untuk satu Desa saja, tetapi ada beberapa Desa yang disiapkan kebutuhan pangannya, sehingga keinginan dan kebutuhan KPM pun beragam.

Untuk menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan tersebut juga masih ditemukan kendala dalam hal penyiapanbahan pangan, dimana ketahanan bahan pangan membuat dilema untuk menerapkan hal tersebut seperti penyedian ikan yang mana ikan cepat membusuk jika tidak diserahkan dalam waktu satu hari setelah pembelian.

Pembagian pangan dinilai belum efektif karena mekanisme penyedian bahan pangan yang digunakan disesuaikan dengan Pedoman Umum, sebagaimana disebut diatas sehingga proses penyaluran bantuan dari Kemensos diberikan langsung ke KPM melalui KKS yang dimiliki KPM dan dapat langsung menggunakan saldo tersebut untuk membeli bahan pangan sesuai keinginan di Agen e-warong.

Kemudian dengan diterapkannya sistem paket tersebut rawan adanya kecurangan dalam proses penentuan bahan pangan yang akan dipaketkan, dan terdapat keraguan apakah paket bahan pangan tersebut memiliki nilai yang sesuai dengan nominal saldo yang diberikan Kemensos ke masing-masing KPM atau tidak hal ini dapat menjadikan kecurigaan kepada Agen e-warong. Selain itu adanya pemaketan ini KPM tidak dapat memilih bahan pangan yang sesuai dengan kriteria KPM.

Agar kendala ini dapat teratasi sebagai Agen e-warong diharapkan dapat menyediakan kebutuhan sesuai dengan pedoman

umum agar tidak ada kecurangan dalam penukaran saldo menjadi bahan pangan, sebagai pendamping BPNT diharapkan agar selalu memantau penyedian barang di Agen e-warong setiap pencairan dana dilakukan agar terpenuhinya minat kebutuhan KPM dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oknum tertentu.

2) Adanya kendala pada resi pembelian bahan pangan

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai seperti yang diatur melalui Peraturan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Perdirjen PFM) No. 05/4/PER/HK.02.01/11/2019, e-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Dalam juknis tersebut, tidak ada pembedaan bahwa yang wajib menyimpan bukti transaksi adalah e-warong yang berbentuk kelompok usaha bersama (KUBE) saja atau e-warong non-KUBE saja, tetapi seluruh e-warong terlepas dari apapun bentuknya wajib menyimpan bukti transaksi tersebut. Bukti transaksi tersebut adalah berupa struk pembelian, resi, dan rekapitulasi pembelian oleh KPM BPNT.

Rekapitulasi pembelian merupakan laporan pembelanjaan KPM yang dibuat oleh e-warong, yang berisi jenis bahan sembako yang dibeli KPM beserta harga tiap sembako.

Kewajiban e-warong untuk mencatat atau membuat laporan pembelanjaan KPM sebagai bentuk bukti transaksi yang harus

dimiliki e-warong juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank penyalur dengan e-warong. Pencatatan data transaksi tersebut digunakan oleh bank penyalur untuk mengawasi kewajaran harga bahan pangan yang dijual oleh e-warong. Data transaksi KPM tersebut juga disampaikan oleh e-warong kepada pendamping BPNT sebagai pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT oleh pendamping BPNT.

Akan tetapi, dari hasil wawancara yang dilakukan tidak semua e-warong membuat laporan pembelanjaan KPM terutama pada Desa Muara Ninian, Agen e-warong tidak memberikan resi pembelian sembako kepada KPM. Hal ini menyebabkan ketidaterbukaan antara Agen e-warong dengan KPM.

Sebagai Agen e-warong seharusnya selalu memberikan bukti pembelian tiap sembako agar tidak ada kecurigaan maupun kecurangan dalam pembelian pangan, jika Agen e-warong tetap tidak memberikan resi pada pembelian pangan maka pendamping BPNT daerah wajib memberikan teguran agar Agen e-warong menyiapkan resi pembelian pada pencairan selanjutnya.

b. Agen E-Warong

1) Adanya kendala teknis pada saat pencairan

Adapun kendala yang sering dijumpai pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) seperti kendala teknis yakni terdapat saldo kosong yang akan menyebabkan penyaluran

bantuan tersebut terhambat dan tidak serentak, karena banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan pengisian saldo dari bank penyalur tersebut, seperti verifikasi data penerima karena data KPM belum lengkap sehingga penerima harus menunggu beberapa hari sampai dana bantuan belum masuk ke rekening penerima, kordinasi antar lembaga dan juga penganngaran yang harus diperiksa secara teliti sebelum bantuan disalurkan.

Agen e-warong dapat menanyakan informasi lebih lanjut kepada pendampimg BPNT untuk mendapatkan penjelasan mengenai status bansos KPM. Proses transfer dana mungkin memerlukan waktu, kesabaran dalam berkomunikasi dengan pendamping dan KPM sangat penting untuk menyelesaikan permsalahan ini dengan baik.

2) Adanya Permasalahan Kartu Rusak, Patah, Terblokir, Eror Dan Kartu Hilang.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah penganti Kartu Perlindungan Sosial yang berfungsi sebagai penanda keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM akan mendapatkan KKS untuk diisikan saldo bantuan yang ditransfer oleh Bank Mandiri.

Setiap keluarga diberikan saldo setiap bulan yang disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Dan sering sekali ditemukan kendala-kendala pada saat penerimaan bantuan tersebut diantaranya permasalah kartu rusak, patah atau kartu hilang hal ini

jika terjadi segera dilaporkan supaya tidak menghambat penerimaan bantuan. Apabila ditemukan hal tersebut diperlukan mekanisme penyelesaiaan dengan tahap

a) KPM BPNT melaporkan permasalahan kartu rusak, patah, terblokir dan kartu hilang kepada Dinas Sosial Kabupaten atau kota melalui pendamping bantuan pangan non tunai (BPNT)
b) Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota melaporkan ke kantor cabang Bank penyaluran dengan tembusan ke Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta memberikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan data nama dan alamat ditambah nomor rekening dan nomor kartu kombo serta melampirkan kartu rusak dan masalah kartu lainnya
c) Kantor Cabang Bank Penyaluran harus menindak lanjuti laporan tertulis harus mengganti kartu kombo yang rusak, terblokir dan hilang paling lambat 21 (dua puluh satu hari kerja). Namun, kartu hilang akan diberi biaya pembuatan ulang sebeser Rp. 15.000 (lima belas ribu)
d) Kantor Cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota dan Kantor Pusat Bank Penyalur
e) Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota secara tertulis meminta ulang kartu kombo yang rusak, patah, terblokir dan

yang hilang kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku pengguna anggaran

f) Bank Penyalur Pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian kartu kombo yang rusak, patah, terblokir atau yang hilang kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran.

Agar kendala seperti ini dapat teratasi sebagai KPM dihimbau agar menyimpan hartu dengan baik ditempatkan di tempat yang aman seperti dalam dompet dan tas. Tiap KPM juga diharapkan agar mencatat password KKS agar tidak lupa pada saat pengambilan dana, dan KKS tidak terblokir karena kesalahan password.

3) Adanya Ketidak Konsistenan Jadwal Penyaluran Bantuan Setiap Bulanya.

Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen Bank penyalur (Bank Mandiri). Bank penyalur adalah salah satu instrument penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening KPM (KKS).

Proses pemindahbukuan dilakukan paling lama 30 hari setiap bulannya sejak dana di transfer dari kas Negara atau Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur (Bank Mandiri). Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman

umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana.

Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan karena penganggaran yang harus dilaksanakan secara teliti sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidak konsistenan jadwal ini mengakibat kecemasan bagi tiap KPM.

KPM perlu memantau informasi terkini mengenai jadwal pencairan untuk menghindari kebingungan, jika KPM masih bingung, maka dapat menanyakan masalah keterlambatan pencairan ini kepada pendamping sosial untuk mendapatkan informasi.

Kendala-kendala yang dialami tersebut mengakibatkan pelaksanaan yang ada di Desa Muara Ninian terbilang kurang maksimal. Hal ini perlu ada atensi khusus dari berbagai macam pihak dan juga perlu adanya pelaksanaan yang lebih optimal lagi yang harus dilakukan oleh lembaga terkait untuk memaksimalkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Muara Ninian supaya program tersebut bisa berjalan lebih baik untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.